

Agama Islam, Militansi, dan Pertahanan Negara: Kebijakan Menjaga Keseimbangan

Aris Sarjito

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

arissarjito@gmail.com

Abstrak

Hubungan antara agama Islam dan pertahanan negara adalah topik yang kritis, dimana kelompok-kelompok ekstremis mengklaim adanya motivasi keagamaan. Memahami dinamika ini penting untuk menjaga keseimbangan. Penelitian ini menyelidiki hubungan antara agama Islam dan pertahanan negara, dengan fokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan militansi dan mengusulkan strategi untuk menyeimbangkan kepatuhan beragama dengan keamanan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan menggunakan sumber data sekunder seperti artikel akademis, buku, laporan, dan database online. Data dianalisis melalui analisis tematik untuk mengidentifikasi tema dan pola utama terkait agama Islam, militansi, dan pertahanan negara. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa hubungan antara agama Islam dan militansi sangatlah kompleks. Meskipun Islam sebagai agama pada dasarnya tidak mendukung kekerasan, penafsiran teks agama dan faktor sosial-politik dapat berkontribusi pada munculnya militansi. Strategi untuk menjaga keseimbangan yang tepat termasuk mendorong pendidikan agama yang didasarkan pada ajaran moderat, menerapkan langkah-langkah kontra-ideologis yang efektif, dan mendorong pemerintahan yang inklusif. Hubungan antara agama Islam dan pertahanan negara sangatlah kompleks, sehingga memerlukan pendekatan seimbang yang menyeimbangkan dimensi agama dan sosial-politik, mengedepankan interpretasi moderat dan tata kelola yang inklusif.

Kata Kunci: agama Islam; ekstremisme agama; militansi; pertahanan negara

Abstract

The relationship between Islamic religion and national defense is a critical topic, with extremist groups claiming religious motivations. Understanding this dynamic is essential for maintaining balance. This research investigates the relationship between Islamic religion and national defense, focusing on factors influencing militancy development and proposing strategies to balance religious adherence with national security.

This study employs a qualitative research method, using secondary data sources such as academic articles, books, reports, and online databases. The data is analyzed through thematic analysis to identify the key themes and patterns related to Islamic religion, militancy, and national defense. The research findings reveal that the interplay between Islamic religion and militancy is complex. While Islam as a religion does not inherently endorse violence, interpretations of religious texts and socio-political factors can contribute to the rise of militancy. Strategies to maintain the right balance include promoting religious education grounded in moderate teachings, employing effective counter-ideological measures, and fostering inclusive governance. The relationship between Islamic religion and national defense is complex, requiring a balanced approach that balances religious and socio-political dimensions, promoting moderate interpretations and inclusive governance.

Keywords: *Islamic religion; militancy; national defense; religious extremism*

PENDAHULUAN

Hubungan antara Islam, militansi, dan pertahanan negara telah menjadi subjek kajian yang menonjol karena dampaknya yang signifikan terhadap keamanan global. Interaksi yang kompleks antara ketiga elemen ini memerlukan analisis menyeluruh terhadap latar belakang historis, sosio-politik, dan teologisnya. Dengan memahami hubungan ini, para akademisi, pembuat kebijakan, dan praktisi dapat mengembangkan pemahaman komprehensif mengenai tantangan keamanan yang dihadapi oleh negara-negara yang memiliki populasi Muslim dalam jumlah besar. Penelitian ini mengeksplorasi latar belakang pentingnya mengkaji hubungan antara Islam, militansi, dan pertahanan negara.

Berikut adalah beberapa alasan mengapa mempelajari hubungan ini penting:

- a. Meningkatnya ancaman teroris: Negara-negara dengan populasi Muslim yang besar menghadapi peningkatan ancaman teroris dari kelompok Islam militan (LeSage, 2014);
- b. Pembelajaran organisasi: Memahami pembelajaran organisasi kelompok militan Islam sangat penting untuk penelitian dan kebijakan kontra-terorisme (Kenney, 2009);
- c. Kelompok militan Islam aktif: Beberapa negara memiliki kelompok militan Islam aktif yang telah menyatakan kesetiaan kepada ISIS, termasuk Boko Haram di Nigeria dan Kelompok Abu Sayyaf di Filipina

(Mapping Militant Organizations, 2021); d. Memanfaatkan kekacauan: Al-Qaeda dan ISIS mengeksploitasi kekacauan untuk meningkatkan ancaman besar dan regional (Group, 2016); e. Ideologi militansi Islam modern: Ayman Al-Zawahiri adalah ideolog militansi Islam modern, dan tujuannya adalah penggulingan pemerintah Mesir dengan kekerasan dan pembentukan pemerintahan Islam sebagai gantinya (Aboul-Enein & Al-Zawahiri, 2004); dan f. Jihad: Jihad sebagai perjuangan berkaitan dengan pemahaman diri, kesalehan, mobilisasi, ekspansi, dan pertahanan umat Islam (Esposito, 2002).

Untuk memahami sepenuhnya hubungan antara Islam, militansi, dan pertahanan negara, perspektif sejarah sangatlah penting. Peristiwa yang terjadi selama beberapa dekade terakhir, termasuk kebangkitan organisasi militan Sunni seperti Al-Qaeda dan ISIS, telah membawa pengaruh ideologi ekstremis dalam Islam ke permukaan. Kelompok-kelompok ini, yang seringkali mengaku bertindak atas nama Islam, telah melakukan tindakan kekerasan yang keji terhadap penduduk Muslim dan non-Muslim, sehingga menimbulkan ancaman besar terhadap keamanan nasional. Memahami konteks sejarah sangat penting dalam memisahkan kelompok radikal dari komunitas Muslim yang lebih luas dan damai.

Berikut ini adalah beberapa peristiwa penting yang telah membentuk hubungan ini selama beberapa dekade terakhir: a. Konflik negara adidaya di Afghanistan: Konflik negara adidaya di Afghanistan selama tahun 1980an menjadi periode formatif dalam proliferasi senjata dan munculnya Islam militan dan fundamentalis (Moore, 2023); b. Bangkitnya organisasi militan Sunni: Munculnya organisasi militan Sunni seperti Al-Qaeda dan ISIS membawa dampak ideologi ekstremis dalam Islam ke permukaan (Moore, 2023); c. Penargetan langsung terhadap warga sipil: Tren penargetan langsung terhadap warga sipil terus berlanjut pada tahun 1990-an dan menjadi semakin populer ketika aktor-aktor etno-nasionalis, agama, dan agama-nasionalis mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh matinya atau menurunnya organisasi-organisasi sayap kiri (Moore, 2023); d. Memanfaatkan kekacauan: Al-Qaeda dan ISIS mengeksploitasi kekacauan untuk meningkatkan ancaman besar dan regional (Group, 2016); e. Ideologi militansi

Islam modern: Ayman Al-Zawahiri adalah ideolog militansi Islam modern, dan tujuannya adalah penggulingan pemerintah Mesir dengan kekerasan dan pembentukan pemerintahan Islam sebagai gantinya (Aboul-Enein & Al-Zawahiri, 2004) ; dan f. Meningkatnya ancaman teroris: Negara-negara dengan populasi Muslim yang besar menghadapi peningkatan ancaman teroris dari kelompok Islam militan (Cordesman, 2017; LeSage, 2014).

Faktor sosial-politik memainkan peran penting dalam membentuk hubungan ini, dan mempelajari faktor-faktor tersebut akan membantu kita memahami dinamika yang terjadi di negara-negara mayoritas Muslim. Faktor-faktor seperti stagnasi ekonomi, ketidakstabilan politik, krisis identitas, dan ketegangan geopolitik telah berkontribusi pada munculnya militansi. Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini telah menyebabkan perpecahan sektarian dan lingkungan yang kondusif bagi militansi. Pengetahuan mendalam tentang lanskap sosio-politik sangat penting dalam mendorong langkah-langkah kontra-terorisme yang efektif dan memastikan pertahanan negara.

Berikut ini adalah beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap munculnya militansi: a. Stagnasi ekonomi: Stagnasi ekonomi di negara-negara mayoritas Muslim telah berkontribusi terhadap meningkatnya militansi (Khan, 2005); b. Ketidakstabilan politik: Ketidakstabilan politik di negara-negara mayoritas Muslim telah menciptakan lingkungan yang kondusif bagi militansi (Wehrey et al., 2021); c. Krisis identitas: Krisis identitas di kalangan komunitas Muslim telah berkontribusi terhadap meningkatnya militansi (Khan, 2005); d. Ketegangan geopolitik: Ketegangan geopolitik antara negara-negara mayoritas Muslim dan Barat berkontribusi terhadap meningkatnya militansi (Trump, 2017); e. Perpecahan sektarian: Dalam beberapa kasus, ketidakmampuan pemerintah untuk mengatasi masalah sosial-politik telah menyebabkan perpecahan sektarian dan lingkungan yang kondusif bagi militansi (Group, 2016); dan f. Penjangkauan Barat terhadap aktor dan institusi Islam: Penjangkauan Barat terhadap aktor dan institusi Islam di situasi konflik menjadi rumit karena adanya politisasi dan

faksionalisasi aktor-aktor ini setelah perang selama bertahun-tahun (Wehrey et al., 2021).

Hubungan antara Islam, militansi, dan pertahanan negara tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa mendalami aspek teologisnya. Penelitian telah menunjukkan bahwa ideologi ekstremis mengeksploitasi penafsiran tertentu terhadap teks-teks Islam untuk memajukan agenda radikal mereka. Dengan mengkaji penafsiran teologis ini dan mengkontekstualisasikannya dalam tradisi Islam yang lebih luas, para ulama dan pemimpin agama dapat melawan manipulasi ajaran agama. Pemahaman seperti ini memungkinkan untuk mendorong penafsiran Islam yang progresif dan damai, serta mengurangi daya tarik militansi.

Berikut ini adalah beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan a. Eksploitasi ajaran agama: Ideologi ekstremis mengeksploitasi interpretasi tertentu terhadap teks-teks Islam untuk memajukan agenda radikal mereka (Group, 2016); b. Ajaran Al-Quran: Ajaran Al-Quran sangat penting bagi pemahaman diri, kesalehan, mobilisasi, ekspansi, dan pertahanan umat Islam. Jihad sebagai perjuangan berkaitan dengan ajaran tersebut (Esposito, 2002); c. Evolusi terorisme Islam: Untuk lebih memahami akar dan ancaman Islam militan, penting untuk mengkaji bagaimana terorisme modern telah berkembang di Timur Tengah dan Asia Selatan (Moore, 2023); d. Ideologi yang tidak manusiawi: Ideologi yang tidak manusiawi yang memungkinkan terjadinya serangan korban massal telah mencapai tingkatan baru (Moore, 2023); dan e. Legitimasi kekerasan: Dalam kasus kampanye kekerasan yang bersifat defensif, tingkat legitimasinya lebih tinggi (Izant, 2010).

Salah satu aspek penting dalam mempelajari hubungan antara Islam, militansi, dan pertahanan negara adalah memahami proses radikalisasi. Mengenali faktor sosio-ekonomi dan psikologis yang berkontribusi pada individu yang menerima kekerasan sebagai cara perlawanan sangatlah penting. Dengan mengkaji proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi intervensi yang membantu mencegah radikalisasi dan mendorong masyarakat inklusif. Pendekatan proaktif ini membantu

memperkuat pertahanan negara melawan militansi dan menjaga keharmonisan di negara-negara mayoritas Muslim.

Berikut ini adalah beberapa hal penting yang perlu dipertimbangkan a. Radikalisasi sebagai proses perubahan: Radikalisasi paling baik dipandang sebagai proses perubahan, transformasi pribadi dan politik dari satu kondisi ke kondisi lainnya (Muro, 2016); b. Komponen radikalisasi: Meskipun tidak ada jalur yang umum untuk proses radikalisasi ini, ada tiga komponen utama yang mencakup keluhan yang sudah mendarah daging sebagai dasar radikalisasi individu, ideologi yang melegitimasi yang memberikan pembenaran moral atas kekerasan, dan jaringan sosial yang memperkuat keyakinan dan keyakinan baru. memberikan peluang untuk bertindak (Hunter & Heinke, 2011); c. Proses multi-level: Radikalisasi adalah proses multi-level, seperti yang ditunjukkan oleh model piramida. Individu merupakan pusat dari proses sosialisasi ini, namun apa yang terjadi di lingkungan sosiopolitik dan organisasi di sekitarnya juga memainkan peran penting (Muro, 2016); dan d. Melawan radikalisasi: Melawan radikalisasi memerlukan pendekatan proaktif yang berupaya mencegah terjadinya proses radikalisasi. Pendekatan ini umumnya menyasar segmen masyarakat yang rentan terhadap radikalisasi dan melibatkan berbagai pihak di luar komunitas penegak hukum dan intelijen (Vidino, 2010).

Mempelajari hubungan antara Islam, militansi, dan pertahanan negara memberikan wawasan berharga dalam pengembangan strategi kontra-terorisme yang efektif. Berbekal pengetahuan tentang landasan sejarah, sosio-politik, dan teologis, para pembuat kebijakan dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan yang ditargetkan untuk mengatasi akar permasalahan militansi sekaligus menghindari keterasingan terhadap populasi Muslim. Pemahaman komprehensif tentang hubungan ini memungkinkan adanya pendekatan berbeda yang mengurangi daya tarik ekstremisme dalam masyarakat.

Berikut ini beberapa hal penting yang perlu diperhatikan: a. Kebijakan yang ditargetkan: Para pembuat kebijakan dapat mengembangkan kebijakan yang

ditargetkan untuk mengatasi akar permasalahan militansi sekaligus menghindari keterasingan terhadap populasi Muslim (Counterterrorism, 2019); b. Pembelajaran organisasi: Pembelajaran organisasi kelompok militan Islam sangat penting untuk penelitian dan kebijakan kontra-terorisme (Kenney, 2009); c. Pendekatan multi-level: Melawan radikalisme memerlukan pendekatan proaktif yang menargetkan segmen masyarakat yang rentan terhadap radikalisme dan melibatkan berbagai partisipan di luar komunitas penegak hukum dan intelijen (Kenney, 2009); d. Masyarakat inklusif: Intervensi yang membantu mencegah radikalisme dan mendorong masyarakat inklusif sangat penting dalam mengurangi daya tarik ekstremisme dalam masyarakat (Kenney, 2009); dan e. Menggagalkan aktivitas teroris: Upaya dan operasi kontraterorisme yang dilakukan oleh berbagai negara telah menggagalkan aktivitas ISIS dan kelompok teroris lainnya (Counterterrorism, 2019; Ramdeen, 2017).

Di dunia kontemporer, agama Islam sering dikaitkan dengan militansi, yang menimbulkan tantangan besar terhadap upaya pertahanan negara. Menjaga keseimbangan antara menghormati hak individu untuk menjalankan agamanya secara bebas dan memastikan keamanan nasional semakin menjadi tugas yang kompleks bagi pemerintah di seluruh dunia. Penting untuk segera mengatasi masalah ini guna memupuk keharmonisan dalam masyarakat yang beragam dan secara efektif memerangi ekstremisme. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi masalah menjaga keseimbangan antara agama Islam, militansi, dan pertahanan negara.

Pertanyaan Penelitian:

1. Apa peran agama Islam dalam pertahanan negara?
2. Bagaimana pandangan agama Islam terhadap militansi?
3. Apa pentingnya menjaga keseimbangan yang tepat?

Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian ini secara komprehensif, kita dapat mengembangkan pemahaman yang berbeda mengenai permasalahan ini dan mengusulkan solusi yang efektif. Penting untuk menyadari

bahwa sebagian besar umat Islam di seluruh dunia menjalankan agama mereka dengan damai, dan mengasosiasikan Islam dengan militansi akan melanggengkan stereotip berbahaya yang menghambat kohesi sosial. Mencapai keseimbangan yang tepat antara kebebasan beragama, keamanan nasional, dan pertahanan memerlukan pendekatan multifaset yang mencakup dimensi politik, sosial, ekonomi, dan pendidikan. Hanya melalui langkah-langkah komprehensif seperti itulah masyarakat dapat memelihara lingkungan di mana keberagaman agama dan keamanan nasional dapat hidup berdampingan secara harmonis.

Dalam bidang penelitian kualitatif, peneliti bertujuan untuk memahami makna yang dianggap berasal dari pengalaman seseorang dan mengkaji bagaimana makna tersebut membentuk perilaku mereka. Oleh karena itu, metode penelitian kualitatif sangat cocok digunakan dalam penelitian yang mengeksplorasi dinamika rumit antara agama, militansi, dan pertahanan negara. Hal ini memungkinkan peneliti untuk menangkap kedalaman dan nuansa pengalaman pribadi dalam konteks masyarakat yang lebih luas.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang mengacu pada informasi yang telah dikumpulkan sebelumnya dan dapat diakses publik. Hal ini dapat mencakup berbagai sumber, seperti jurnal akademis, buku, laporan pemerintah, situs web, dan liputan media (Creswell, 2014).

PEMBAHASAN

Agama Islam dan Pertahanan Negara

Keterkaitan antara agama dan pertahanan negara merupakan tema yang berulang sepanjang sejarah, tidak terkecuali hubungan antara agama Islam dan pertahanan negara. Ajaran, nilai-nilai, dan peristiwa sejarah Islam telah mempengaruhi strategi pertahanan, perkembangan militer, dan sentimen patriotik di banyak negara mayoritas Muslim. Diskusi ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana hubungan agama Islam dan pertahanan negara dalam sejarah, dengan mengambil contoh dari beberapa negara.

Ajaran Islam dan Militerisme

Al-Qur'an, kitab suci Islam, memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk peperangan. Ajaran Islam menekankan pentingnya pertahanan diri, mengedepankan gagasan Jihad sebagai kewajiban agama. Jihad sering disalahpahami dan disalahartikan sebagai terorisme atau agresi; namun, dalam konteks sebenarnya, hal ini mengacu pada perjuangan yang adil untuk membela diri, keharmonisan komunal, dan keadilan sosial (Yilmaz & Erturk, 2021).

Ajaran Islam menekankan pentingnya pertahanan diri, mengedepankan gagasan Jihad sebagai kewajiban agama. Namun, Jihad sering disalahpahami dan disalahartikan sebagai terorisme atau agresi. Dalam konteks sebenarnya, hal ini mengacu pada perjuangan yang adil untuk membela diri, keharmonisan komunal, dan keadilan sosial. Berikut ini adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan:

a. Jihad sebagai perjuangan: Istilah Jihad, yang sering diterjemahkan sebagai “perang suci”, sebenarnya berarti perjuangan atau pengerahan tenaga. Nabi Muhammad SAW menyebut peperangan sebagai “Jihad kecil” dibandingkan dengan perjuangan melawan kejahatan jiwa, yang beliau gambarkan sebagai “Jihad unggul” (Aly, 2014).

b. Jihad Militer: Jihad Militer adalah satu-satunya bentuk perang yang dapat diterima dalam Islam, yang melarang penggunaan kekuatan untuk mendapatkan keuntungan materi atau balas dendam. Oleh karena itu, pada abad ke-7, konsep Jihad menjadi batasan utama (Aly, 2014).

c. Ajaran Alquran: Ajaran Alquran sangat penting bagi pemahaman diri, kesalehan, mobilisasi, ekspansi, dan pertahanan umat Islam. Jihad sebagai perjuangan berkaitan dengan ajaran tersebut (Aly, 2014).

d. Kesalahpahaman: Banyak penulis modern mengklaim bahwa makna utama Jihad adalah perjuangan spiritual internal, dan hal ini diterima oleh banyak umat Islam. Namun demikian, banyak sekali referensi mengenai Jihad sebagai perjuangan militer dalam tulisan-tulisan Islam sehingga tidak tepat bila menyatakan bahwa penafsiran Jihad sebagai perang suci adalah salah (Corera, 2008).

e. Teori perang yang adil: Jihad dalam Islam, atau peperangan untuk membela kehidupan dan hak beragama umat Islam, secara hukum dapat dianalogikan dengan teori perang yang adil yang diabadikan dalam hukum internasional. Jihad sendiri merupakan konsep yang lebih luas dalam Islam, termasuk tindakan amal yang sulit dan perjuangan spiritual melawan Setan dan hawa nafsu (Parrott, 2020).

Al-Qur'an, kitab suci Islam, memberikan panduan tentang berbagai aspek kehidupan, termasuk peperangan. Ajaran Islam menekankan pentingnya pertahanan diri, mengedepankan gagasan Jihad sebagai kewajiban agama. Jihad sering disalahpahami dan disalahartikan sebagai terorisme atau agresi; namun, dalam konteks sebenarnya, hal ini mengacu pada perjuangan yang adil untuk membela diri, keharmonisan komunal, dan keadilan sosial.

Kekhalifahan Rashidun memberikan contoh ajaran Islam dan pengaruhnya terhadap pertahanan negara. Tentara Rashidun, yang dipimpin oleh para pemimpin Islam awal seperti Khalifah Umar ibn al-Khattab, berkembang pesat namun mempertahankan persatuan Arab-Muslim melalui prinsip-prinsip toleransi, belas kasihan, dan rasa hormat terhadap non-Muslim. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan (El-Hibri, 2010):

- a. Kekhalifahan Rashidun: Kekhalifahan Rashidun adalah kekhalifahan pertama yang menggantikan nabi Islam Muhammad SAW. Kota ini diperintah oleh empat khalifah pertama berturut-turut Muhammad SAW setelah wafatnya pada tahun 632 M (11 H).

- b. Persatuan Arab-Muslim: Tentara Rashidun menjaga persatuan Arab-Muslim melalui prinsip toleransi, belas kasihan, dan menghormati non-Muslim.
- c. Kebijakan Para Khalifah Rashidun: Kebijakan para Khalifah Rashidun meletakkan dasar gaya pemerintahan bagi banyak penguasa di masa depan. Mereka berkuasa di tanah Islam sebagai raja muda Nabi Muhammad SAW, dan kebijakan mereka meletakkan dasar gaya pemerintahan bagi banyak penguasa di masa depan.
- d. Kategori warga negara: Secara umum, warga negara Kekhalifahan Rasyidin dapat dibagi menjadi dua kategori: Muslim dan non-Muslim. Meskipun umat Islam menikmati hak-hak istimewa tertentu yang diperuntukkan bagi mereka seperti standar kewarganegaraan yang lebih tinggi, kebebasan beribadah sepenuhnya ditawarkan kepada semua orang, dan khalifah adalah pelindung spiritual atas kehidupan dan harta benda mereka.
- e. Ekspansi militer: Tentara Rashidun berkembang pesat melampaui tanah Arab, mendirikan basis kerajaan Islam dan memperluas perbatasannya.

Kekhalifahan Rashidun menjadi contoh bagaimana ajaran Islam mampu menggugah rasa bela negara yang melampaui identitas agama atau etnis. Tentara Rashidun berkembang pesat namun mempertahankan persatuan Arab-Muslim melalui prinsip toleransi, belas kasihan, dan rasa hormat terhadap non-Muslim.

Contoh dari Berbagai Negara

a. Kesultanan Utsmaniyah

Kesultanan Utsmaniyah yang berdiri selama beberapa abad merupakan negara Islam yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap ajaran Islam dan pertahanan negara. Prinsip-prinsip Islam membentuk institusi militer kekaisaran, seperti Janissari, pasukan infanteri elit. Kekaisaran ini memperoleh kekuatannya dari kombinasi administrasi yang efektif, teknik, dan kekuatan militer yang

beragam secara budaya. Meskipun pada akhirnya mengalami kemunduran, warisan militer Kesultanan Utsmaniyah berakar pada fondasi Islam (Barkey, 2014).

b. Pakistan

Pakistan, yang didirikan pada tahun 1947 sebagai negara mayoritas Muslim yang independen, sangat menekankan pertahanan negara dan ajaran Islam. Strategi pertahanan negara, pelatihan militer, dan perekrutan sering kali mengacu pada nilai-nilai Islam, yang mencerminkan perpaduan sentimen agama dan nasionalistik. Kehadiran pasukan Pakistan dalam misi penjaga perdamaian PBB menunjukkan bagaimana ajaran Islam mempengaruhi partisipasi negara tersebut dalam upaya pertahanan global (Naz, 2020).

c. Iran

Iran, negara mayoritas Muslim lainnya, memiliki hubungan unik antara agama dan pertahanan negara. Setelah Revolusi Islam pada tahun 1979, militer Iran mengalami transformasi yang signifikan. Garda Revolusi (IRGC) menjadi kekuatan instrumental dalam melindungi nilai-nilai revolusi dan membela kepentingan negara. Strategi pertahanan Iran mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam Syiah tentang pertahanan diri dan kedaulatan negara (Saunders, 2019).

d. Arab Saudi:

Arab Saudi, tempat kelahiran Islam, terus memainkan peran penting dalam melestarikan warisan Islam dan memberikan perlindungan terhadap tempat-tempat suci umat Islam. Angkatan Bersenjata Arab Saudi, selain berperan sebagai pelindung nasional, juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga tempat-tempat keagamaan di negara tersebut, khususnya di Mekah dan Madinah. Keterkaitan agama dengan pertahanan negara tercermin pada jalur ziarah bersejarah yang menjadi jalur perdagangan yang dilindungi pada masa ekspansi Islam (International Religious Freedom Report, 2022).

Kontribusi Agama Islam dalam Memperkuat Pertahanan Negara

Agama Islam telah memberikan dampak yang besar terhadap masyarakat sepanjang sejarah, seringkali mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pemerintahan, kohesi sosial, dan perilaku pribadi. Diskusi ini mengeksplorasi kontribusi signifikan agama Islam dalam memperkuat pertahanan negara, dengan fokus pada pengaruhnya terhadap pendidikan, nilai-nilai moral, dan partisipasi aktif umat Islam dalam pertahanan negara.

Pendidikan

Salah satu kontribusi utama agama Islam terhadap pertahanan negara terletak pada penekanannya pada pendidikan. Peradaban Islam awal memiliki komitmen yang mendalam terhadap ilmu pengetahuan, membuat kemajuan signifikan dalam berbagai bidang seperti matematika, astronomi, kedokteran, dan ilmu militer. Umat Islam memahami pentingnya memperoleh pengetahuan dan memajukan pendidikan sebagai sarana untuk melindungi bangsanya (Sijamhodžić-Nadarević, 2023).

Lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah, berperan penting dalam membina individu-individu yang kemudian menjadi tokoh kunci pertahanan negara. Lembaga-lembaga ini menyediakan kurikulum yang komprehensif, termasuk pemikiran strategis, taktik militer, dan pelatihan etika, untuk menghasilkan individu yang mampu menjaga komunitas dan negaranya. Oleh karena itu, dengan mengedepankan pendidikan, agama Islam secara tidak langsung berkontribusi terhadap pertahanan negara dengan menyiapkan tenaga kerja yang berpengetahuan, cakap secara intelektual, dan kompeten (Mandaville & Hamid, 2018).

Nilai moral

Ajaran Islam telah menanamkan pedoman moral yang kuat dalam diri para pengikutnya, yang mencakup prinsip-prinsip keadilan, kasih sayang, integritas, dan perilaku etis. Nilai-nilai tersebut sangat mendasar baik dalam kehidupan pribadi

maupun dalam masyarakat, termasuk pertahanan negara (Ebrahimi & Yusoff, 2017).

Pertimbangkan ajaran etika Islam, seperti "jangan melanggar", "jangan merugikan warga sipil dalam peperangan", dan "hormati perjanjian". Ajaran ini mengatur perilaku umat Islam dalam situasi konflik, memastikan mereka mematuhi aturan yang melarang penggunaan kekuatan berlebihan, menargetkan warga sipil yang tidak bersalah, atau melanggar perjanjian internasional (Smock, 2006).

Militansi dalam Perspektif Agama Islam

Konsep militansi dalam agama Islam telah mendapat perhatian signifikan di dunia akademis dan wacana publik. Sementara mayoritas umat Islam menjalani kehidupan damai yang didedikasikan untuk iman dan pertumbuhan pribadi, sebagian kecil memilih jalan militansi, menggunakan kekerasan sebagai sarana untuk mencapai tujuan mereka (Rahim et al., 2015). Diskusi ini bertujuan untuk memberikan tinjauan konseptual mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi militansi dalam Islam, menyoroti dinamika internal dan eksternal yang berkontribusi terhadap munculnya kecenderungan militan.

Sifat Militansi dalam Agama Islam

Militansi, sebagai sebuah konsep, mengacu pada serangkaian aktivitas kekerasan yang didorong oleh motif sosio-politik, ideologi, atau agama, yang dilakukan oleh individu atau organisasi yang mengidentifikasi diri mereka sebagai bagian dari keyakinan Islam. Penting untuk diketahui bahwa militansi tidak mendefinisikan keseluruhan agama, melainkan mewakili ekspresi ekstrem yang bertentangan dengan inti ajaran Islam (Moore, 2023).

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Militansi

a. Konteks Sejarah dan Politik

Peristiwa sejarah, seperti kolonialisme, invasi, dan konflik politik, seringkali menimbulkan keluhan di kalangan masyarakat, termasuk umat Islam, yang dapat dieksploitasi oleh kelompok militan. Contoh seperti penjajahan Inggris di Palestina, invasi Soviet ke Afghanistan, atau konflik yang sedang berlangsung di wilayah sengketa Kashmir telah memberikan lahan subur bagi berkembangnya militansi (Cordesman, 2017; Moore, 2023).

b. Faktor Sosial Ekonomi

Kesenjangan sosial ekonomi, kurangnya pendidikan, dan tingginya tingkat pengangguran dapat menyebabkan frustrasi, keterasingan, dan rasa putus asa di antara segmen masyarakat Muslim tertentu. Dalam keadaan seperti ini, ideologi ekstremis dapat mengeksploitasi kelompok rentan dengan menawarkan tujuan, identitas sosial, dan jalan keluar untuk menyampaikan keluhan mereka di tengah marginalisasi mereka (Brown et al., 2021).

c. Marginalisasi Politik

Pengecualian kelompok Muslim tertentu dari proses politik dapat menimbulkan kebencian dan kecenderungan ke arah militansi. Ketika individu atau komunitas merasa tidak didengarkan atau ditindas, ideologi militan mungkin menjanjikan mereka sarana emansipasi atau suara melawan ketidakadilan yang dirasakan (Maizland, 2020).

d. Interpretasi Ideologis

Interpretasi radikal dan menyimpang terhadap kitab suci Islam dapat menjadi faktor penting yang mempengaruhi militansi. Ideologi Salafi-jihadis, yang disebarkan oleh kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda dan ISIS, secara keliru menampilkan versi Islam yang menyimpang, dengan membenarkan kekerasan sebagai kewajiban agama terhadap orang-orang yang dianggap sebagai musuh. Penafsiran seperti itu mengeksploitasi individu rentan yang mencari makna dan

memberikan kerangka ideologis untuk militansi (Parkinson, 2021; Trip et al., 2019; Vermeulen et al., 2022).

e. Konflik Internasional dan Regional

Keterlibatan kekuatan asing dan konflik regional, khususnya yang terjadi di negara-negara mayoritas Muslim, dapat memperburuk militansi. Aktor eksternal yang mengejar kepentingan strategis mereka mungkin secara tidak sengaja atau sengaja memicu radikalisme dan respons militeristik, sehingga mengarah pada lingkaran setan kekerasan dan perekrutan (Ero & Atwood, 2021).

Menilai Tingkat Militansi Umat Islam: Analisis Global dan Lokal

Gagasan militansi di kalangan umat Islam menjadi topik yang sangat memprihatinkan, apalagi sering dikaitkan dengan berbagai aksi kekerasan, terorisme, dan ekstremisme. Namun, penting untuk menangani masalah ini dengan obyektif, dengan mempertimbangkan dinamika global dan lokal yang berkontribusi terhadap persepsi militansi dalam umat Islam. Diskusi ini bertujuan untuk menganalisis tingkat militansi, mengeksplorasi akar permasalahannya dan kemungkinan solusinya, sekaligus menyoroti mayoritas umat Muslim yang damai.

Tingkat Militansi Global

Di tingkat global, militansi dalam umat Islam dipicu oleh beragam faktor. Faktor sosial ekonomi seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya kesempatan pendidikan dapat menciptakan lahan subur bagi radikalisme. Keluhan politik, seperti intervensi asing, konflik, dan pendudukan tanah Muslim, telah menciptakan rasa ketidakadilan dan permusuhan di kalangan sebagian Muslim. Penting untuk menyadari bahwa faktor-faktor ini tidak hanya terjadi di dunia Muslim saja, melainkan berkontribusi terhadap konteks militansi yang lebih luas di seluruh dunia (Stares & Yacoubian, 2012).

Munculnya ideologi ekstremis, khususnya Salafisme dan interpretasi militan seperti Wahhabisme, telah berdampak signifikan terhadap persepsi umat

Islam. Ideologi-ideologi ini, yang sering disebarkan melalui ulama radikal dan *platform online*, salah menafsirkan ajaran Islam dan memicu kekerasan. Namun, penting untuk diketahui bahwa ideologi semacam itu hanya mendapat dukungan dari sebagian kecil populasi Muslim, dan sebagian besar penduduk Muslim menolak kekerasan sebagai jawaban atas keluhan mereka (Boukhars, 2017).

Selain itu, ketegangan geopolitik, yang diperburuk oleh Islamofobia dan sensasionalisme media, sering kali memperbesar kesalahpahaman tentang meluasnya militansi umat Islam. Kecenderungan media untuk mengasosiasikan aksi terorisme dengan Islam telah menciptakan stereotip yang tidak menguntungkan, mengaburkan ajaran Islam yang damai dan memperkuat ketakutan masyarakat.

Militansi Tingkat Lokal

Di tingkat lokal, kehadiran militansi dalam umat Islam sangat bervariasi. Beberapa wilayah menghadapi tantangan yang lebih besar karena ketidakstabilan geopolitik atau penindasan politik, sementara wilayah lainnya berhasil mengekang militansi. Konflik lokal, seperti di Afghanistan, Irak, Suriah, dan Palestina, telah menjadi tempat berkembang biaknya berbagai kelompok militan. Kehancuran infrastruktur, korban jiwa, dan pengungsian telah menciptakan kekecewaan dan keputusasaan, mendorong sebagian individu menuju militansi sebagai sarana perlawanan atau kelangsungan hidup (Group, 2016).

Selain itu, tidak adanya pemerintahan yang efektif dan lemahnya institusi di daerah tertentu telah memungkinkan kelompok radikal mengeksploitasi keluhan masyarakat setempat dan membangun basis mereka. Kurangnya akses terhadap pendidikan, penindasan politik, dan korupsi semakin berkontribusi pada kerentanan individu terhadap ideologi radikal.

Mayoritas Muslim yang Damai

Penting untuk ditekankan bahwa sebagian besar umat Islam menolak militansi dan percaya pada prinsip damai Islam. Umat Muslim di seluruh dunia sering kali mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan atas nama agama, dan menentang setiap salah tafsir atau distorsi terhadap ajaran Islam yang mendorong militansi. Upaya yang dilakukan oleh para ulama besar, institusi, dan organisasi akar rumput dalam Umat Islam didedikasikan untuk mempromosikan perdamaian, toleransi, dan dialog antaragama (Gescinska, 2014).

Dampak Militansi terhadap Pertahanan Negara: Menganalisis Dampak Militansi terhadap Keamanan Nasional dan Upaya Pertahanan Negara

Militansi, yang ditandai dengan penggunaan kekerasan atau konflik bersenjata untuk mencapai tujuan politik, sosial, atau agama, telah menjadi tantangan yang terus-menerus bagi negara-negara di seluruh dunia. Dampak militansi terhadap pertahanan negara lebih dari sekadar masalah keamanan, namun juga mencakup berbagai aspek upaya pertahanan suatu negara. Diskusi ini akan menganalisis berbagai konsekuensi militansi, mengkaji dampaknya terhadap keamanan nasional, strategi pertahanan, dan alokasi sumber daya.

a. Ancaman Keamanan Nasional:

Militansi merupakan ancaman langsung terhadap keamanan nasional suatu negara. Organisasi teroris dan kelompok pemberontak merusak stabilitas masyarakat dengan melakukan serangan terhadap penduduk sipil, instalasi militer, dan infrastruktur penting. Sifat serangan yang tidak pandang bulu menyebabkan ketakutan yang meluas, mengganggu stabilitas pemerintahan, dan mengikis kepercayaan terhadap kemampuan negara untuk melindungi warganya. Akibatnya, strategi pertahanan negara terpaksa fokus pada melawan militansi dan memerangi ancaman yang ditimbulkan oleh aktor non-negara (National Intelligence, 2023).

b. Strategi Pertahanan

Militansi memerlukan adaptasi yang signifikan dalam strategi pertahanan. Pendekatan tradisional, yang terutama dirancang untuk mengatasi ancaman konvensional dari negara lain, kini harus mencakup strategi untuk melawan peperangan asimetris dan pemberontakan. Kekuatan pertahanan harus mengalihkan fokus mereka dari pendekatan yang berorientasi eksternal ke pendekatan internal, yang bertujuan untuk menetralkan kelompok militan dan mengurangi kapasitas mereka untuk mengganggu masyarakat. Upaya terkoordinasi antara kekuatan pertahanan, badan intelijen, dan penegak hukum sangat penting dalam melawan taktik yang digunakan oleh kelompok militan (Grieco, 2018).

c. Alokasi Sumber Daya

Memerangi militansi memerlukan sumber daya keuangan yang besar, sehingga mengalihkan dana yang seharusnya dapat dialokasikan ke bidang lain seperti pembangunan, infrastruktur, dan pendidikan. Pemerintah harus memprioritaskan belanja pertahanan dan mencurahkan sumber daya yang signifikan untuk upaya kontraterorisme. Keterbatasan alokasi sumber daya ini dapat menghambat kemampuan suatu negara untuk mengatasi permasalahan sosio-ekonomi yang mendesak, sehingga berpotensi menimbulkan keluhan yang dapat semakin memicu militansi (Abiodun, 2020).

d. Dampak terhadap Tatanan Sosial:

Militansi sering kali menciptakan perpecahan dalam masyarakat, menumbuhkan ketidakpercayaan, ketakutan, dan permusuhan di antara berbagai kelompok etnis, agama, atau sosial. Perpecahan ini melemahkan tatanan sosial yang diperlukan untuk upaya pertahanan negara yang kohesif. Selain itu, organisasi militan mengeksploitasi keluhan masyarakat dan menggunakannya sebagai alat rekrutmen. Pertahanan negara harus mengatasi perpecahan internal ini, mendorong inklusivitas, kohesi sosial, dan mengatasi penyebab mendasar untuk melawan militansi secara efektif (Wasai & Bano, 2019).

e. Kolaborasi Internasional

Militansi menimbulkan ancaman transnasional yang dapat melampaui batas negara, sehingga memerlukan kolaborasi dan kerja sama internasional dalam upaya pertahanan. Berbagi informasi intelijen, latihan militer bersama, dan perjanjian diplomatik menjadi hal yang penting untuk memerangi militansi dalam skala global. Kolaborasi antar negara menumbuhkan rasa saling percaya, meningkatkan kemampuan pertahanan kolektif, dan berkontribusi terhadap stabilitas internasional (Birkler et al., 1997).

Pendekatan dan Strategi: Kebijakan Menyeimbangkan Agama Islam, Mencegah Militansi, dan Pertahanan Negara

Ketika dunia berupaya menjaga perdamaian dan keamanan, penting untuk mengembangkan pendekatan dan strategi yang tepat yang secara efektif menyeimbangkan agama Islam, mencegah militansi, dan mendorong pertahanan negara. Untuk mencapai keseimbangan ini memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap kebebasan beragama, pendidikan, reformasi sosial-ekonomi, dan sistem pertahanan yang proaktif. Dengan mengadopsi pendekatan seperti itu, kita dapat memerangi militansi sambil menjaga nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam, menjamin persatuan nasional, dan menjaga masyarakat luas. Diskusi ini bertujuan untuk mengeksplorasi berbagai pendekatan dan strategi kebijakan untuk mencapai keseimbangan yang rumit ini.

Kebebasan Beragama dan Pendidikan

Kebebasan beragama merupakan pilar fundamental yang harus dihormati, sehingga memungkinkan individu untuk menjalankan keyakinannya tanpa rasa takut akan penganiayaan atau pengucilan. Dengan menjamin persamaan hak dan kesempatan bagi semua kelompok agama, suatu masyarakat dapat memupuk dialog, pemahaman, dan saling menghormati. Selain itu, pendidikan memainkan peran penting dalam memupuk nilai-nilai seperti toleransi, kasih sayang, dan berpikir kritis. Memasukkan ajaran Islam yang menekankan perdamaian, keadilan, dan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia ke dalam sistem

pendidikan dapat mengarah pada terbentuknya masyarakat yang harmonis (Kuzub, 2022).

Reformasi Sosial Ekonomi

Mengatasi masalah sosio-ekonomi sangat penting dalam mencegah tumbuhnya militansi. Kemiskinan, pengangguran, dan marginalisasi merupakan tempat berkembang biaknya ekstremisme, karena individu mungkin menjadi kecewa dan mencari hiburan dalam ideologi radikal. Pemerintah, bekerja sama dengan organisasi keagamaan, harus fokus pada pengentasan kemiskinan, mendorong pemerataan kesempatan, dan meningkatkan kondisi kehidupan bagi seluruh warga negara. Dengan mengatasi kesenjangan dan memberikan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan kepada masyarakat marginal, daya tarik radikalisme dapat dikurangi (Boukhars, 2017).

Mempromosikan Interpretasi Islam Moderat

Mempromosikan interpretasi Islam yang moderat sangat penting untuk melawan ideologi ekstremis. Para ulama dan pemimpin agama dapat memainkan peran penting dengan memperkuat ajaran Islam yang sejati yang menganjurkan perdamaian, toleransi, dan hidup berdampingan. Mendorong dialog antar ulama dan membina kerukunan antar umat beragama dapat membantu mengurangi pengaruh unsur radikal dalam komunitas Muslim. Penting untuk menekankan fakta bahwa Islam adalah agama damai dan bekerja sama untuk menghilangkan kesalahpahaman dan memerangi salah tafsir yang memicu ekstremisme (Safei, 2021).

Sistem Pertahanan Proaktif

Untuk menjamin pertahanan dan keamanan negara, diperlukan sistem pertahanan yang kuat. Negara-negara harus berinvestasi dalam pengumpulan intelijen, operasi kontra-terorisme, dan lembaga penegakan hukum yang efisien. Menerapkan metode pengawasan yang efektif, pengendalian perbatasan, dan undang-undang pengendalian senjata yang ketat dapat membantu mencegah

infiltrasi kelompok militan dan menggagalkan rencana mereka. Namun, hal ini harus dilakukan dengan tetap menghormati kebebasan sipil dan menghindari bias atau diskriminasi terhadap kelompok agama atau etnis tertentu (Huang & Zhu, 2019).

Meningkatkan Dialog Antaragama

Mempromosikan dialog antaragama sangat penting untuk memupuk pemahaman dan kerja sama di antara komunitas agama yang berbeda. Pendekatan ini menekankan nilai-nilai bersama dan tujuan bersama, menjembatani kesenjangan dan melawan narasi yang memecah belah. Dengan melibatkan para pemimpin agama dan komunitas dalam dialog, kesalahpahaman dan stereotip yang sering memicu ekstremisme dapat dilawan. Inisiatif antaragama, konferensi perdamaian, dan proyek kemanusiaan bersama memberikan kontribusi yang signifikan dalam membangun kepercayaan dan meningkatkan kohesi sosial (Driessen, 2020).

Peran Lembaga Keagamaan dalam Mendorong Moderasi dan Toleransi

Institusi keagamaan telah memainkan peran penting dalam masyarakat sepanjang sejarah, membentuk keyakinan masyarakat, nilai-nilai moral, dan kesejahteraan spiritual. Selain berfungsi sebagai pusat ibadah, lembaga-lembaga ini memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keharmonisan sosial dan mendorong kohesi (van Buitenlandse Zaken, 2015).

a. Pelestarian Inti Ajaran Keagamaan

Lembaga-lembaga keagamaan bertindak sebagai penjaga gerbang teks dan ajaran suci, melestarikan dan menyebarkan ajaran inti agama masing-masing. Dengan mentransmisikan prinsip-prinsip dan keyakinan dasar, lembaga-lembaga keagamaan menanamkan pada umatnya pentingnya moderasi dan toleransi, mengingatkan mereka akan esensi agama mereka (Mallarach & Verschuuren, 2019).

b. Mendorong Hidup Berdampingan Secara Damai

Institusi keagamaan memainkan peran penting dalam membina hidup berdampingan secara damai di antara berbagai kelompok. Mereka mengadvokasi martabat manusia, keadilan sosial, dan kasih sayang, dengan menekankan nilai yang melekat pada setiap individu. Dengan mengedepankan nilai-nilai ini, lembaga keagamaan mencegah diskriminasi, kekerasan, dan ekstremisme, sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk keharmonisan dan saling menghormati (Smock, 2006).

c. Mendorong Pertumbuhan Spiritual dan Tanggung Jawab Moral Individu

Lembaga keagamaan menawarkan bimbingan spiritual kepada penganutnya, mendorong mereka untuk mencari pertumbuhan pribadi dan pengembangan moral. Melalui ajaran yang menekankan kerendahan hati, penerimaan, pengampunan, dan cinta terhadap sesama manusia, lembaga keagamaan membantu individu mengadopsi perspektif moderat dan inklusif, mendorong masyarakat yang toleran (Vieten & Lukoff, 2022).

d. Dialog dan Kolaborasi Antaragama

Institusi keagamaan juga memainkan peran penting dalam mendorong dialog dan kolaborasi antaragama. Melalui keterlibatan konstruktif dengan komunitas agama lain, lembaga-lembaga ini menciptakan platform untuk komunikasi terbuka, pemahaman, dan kerja sama. Dengan berbagi ajaran dan terlibat dalam diskusi dengan kelompok agama yang berbeda, lembaga keagamaan secara aktif mendorong toleransi, rasa hormat, dan persatuan di antara tradisi agama yang berbeda (Rofiqi & Haq, 2022).

e. Mengatasi Keadilan Sosial

Institusi keagamaan seringkali mengambil peran aktif dalam mengatasi ketidakadilan sosial. Dengan mengadvokasi kesetaraan, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia, lembaga-lembaga ini mempromosikan pendekatan yang moderat dan toleran terhadap tantangan masyarakat. Melalui program

penjangkauan masyarakat, kegiatan amal, dan keterlibatan dalam gerakan keadilan sosial, lembaga keagamaan memainkan peran konstruktif dalam membangun kembali masyarakat dan memupuk saling pengertian (Mische, 2007).

f. Kompas Moral dan Pedoman Etika

Institusi keagamaan berfungsi sebagai kompas moral, memberikan panduan etika kepada individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan menekankan prinsip kasih sayang, cinta, dan empati, lembaga-lembaga ini menumbuhkan suasana moderasi, membantu individu mengatasi dilema moral yang kompleks. Melalui khotbah, pengajaran agama, dan konseling, para pemimpin agama menginspirasi pengikutnya untuk menghadapi situasi yang menantang dengan empati dan moderasi (Schwadel & Hardy. Sam, 2021).

Peran Penting Pemerintah dalam Menghadapi Militansi dan Menjamin Pertahanan Negara

Militansi dan kebutuhan akan pertahanan negara yang kuat menimbulkan tantangan besar terhadap stabilitas dan kesejahteraan suatu negara. Pemerintah di seluruh dunia mempunyai peran penting dalam melawan ancaman-ancaman ini secara efektif untuk melindungi warga negaranya dan menjaga perdamaian di dalam negaranya. Esai ini mengeksplorasi peran sentral pemerintah dalam menghadapi militansi dan memastikan pertahanan negara, menyoroti tanggung jawab, strategi, dan kebijakan mereka untuk mengatasi tantangan-tantangan ini.

a. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Melawan Militansi

Memberikan Keamanan dan Perlindungan: Salah satu tanggung jawab utama pemerintah mana pun adalah memberikan keamanan dan melindungi warganya dari potensi ancaman. Hal ini memerlukan pembentukan dan pemeliharaan lembaga penegak hukum yang kompeten, jaringan intelijen, dan unit kontra-terorisme. Pemerintah harus mengatasi kerusuhan sosial, ekstremisme, dan

radikalisasi, sekaligus mendorong integrasi masyarakat dan dialog antaragama untuk mencegah penyebaran militansi dan penyebab utamanya (Security, 2019).

Tindakan dan Kebijakan Legislatif: Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk menyusun dan menegakkan undang-undang yang memadai yang mengkriminalisasi dan menghukum individu yang terlibat dalam kegiatan militan. Pengembangan dan penerapan kebijakan dan undang-undang anti-terorisme memberdayakan badan intelijen untuk mengidentifikasi, memantau, dan menangkap potensi ancaman. Langkah-langkah tersebut memerlukan keseimbangan antara menjaga keselamatan publik dan melindungi kebebasan sipil, memastikan bahwa upaya keamanan tidak bertentangan dengan hak-hak dasar warga negara (Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Human Rights, 2008).

b. Strategi dan Kebijakan dalam Melawan Militansi dan Menjamin Pertahanan Negara

Pengumpulan dan Pembagian Intelijen: Pemerintah harus membangun dan memelihara jaringan intelijen yang kuat untuk melawan militansi secara efektif. Mengumpulkan dan menganalisis informasi tentang potensi ancaman sangat penting untuk tindakan pencegahan dan menjaga keamanan nasional. Selain itu, menjalin kolaborasi yang kuat dan protokol berbagi informasi dengan mitra internasional memungkinkan pemerintah memperoleh manfaat dari intelijen kolektif, sehingga meningkatkan kemampuan mereka untuk mengantisipasi dan mencegah serangan di masa depan (Nawaz, 2016).

Belanja Pertahanan dan Kemajuan Teknologi: Pemerintah mengalokasikan sumber daya yang besar untuk membangun dan mempertahankan kemampuan militer mereka. Hal ini mencakup pendanaan untuk penelitian dan pengembangan teknologi canggih, sistem pengawasan, infrastruktur keamanan siber, dan persenjataan. Investasi dalam modernisasi pertahanan sangat penting dalam melawan sifat peperangan kontemporer yang asimetris dan memitigasi potensi ancaman yang ditimbulkan oleh militansi (Jones et al., 2021).

c. Kerja Sama Internasional dalam Melawan Militansi

Perjanjian Keamanan Kolaboratif: Pemerintah harus secara aktif terlibat dalam aliansi keamanan regional dan internasional, seperti NATO atau perjanjian pertahanan bilateral. Kerangka kerja sama ini memungkinkan adanya bantuan timbal balik, pembagian intelijen, latihan militer bersama, dan tanggapan terkoordinasi terhadap militansi. Dengan berkolaborasi dengan negara lain, pemerintah dapat secara efektif memerangi ancaman transnasional dan bertukar praktik terbaik untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara masing-masing (UNODC, 2009).

Diplomasi dan Resolusi Konflik: Pemerintah memainkan peran penting dalam menyelesaikan konflik melalui cara-cara diplomatik, yang dapat membantu mencegah penyebaran militansi di dalam dan melintasi perbatasan. Upaya diplomasi, termasuk negosiasi perdamaian, mediasi, dan inisiatif resolusi konflik, sangat penting dalam mengatasi penyebab utama militansi dan mendorong stabilitas, kerja sama, dan dialog antar pihak (UNODC, 2009).

KESIMPULAN

Agama Islam dan pertahanan negara memiliki sejarah panjang, membentuk strategi pertahanan di negara-negara mayoritas Muslim. Ajaran Islam mengedepankan pembelaan diri, kerukunan masyarakat, dan pelestarian agama. Contoh sejarah menunjukkan bagaimana Islam menginspirasi patriotisme, melindungi kepentingan negara, dan menghormati keberagaman komunitas. Memahami hubungan ini sangat penting untuk menciptakan persepsi yang lebih damai di negara-negara mayoritas Muslim.

Memahami faktor-faktor yang mempengaruhi militansi dalam agama Islam sangat penting untuk mengembangkan strategi kontra-terorisme yang efektif dan menumbuhkan pemahaman di antara individu dan komunitas. Mengatasi ketidakadilan dalam sejarah, kesenjangan sosial ekonomi, marginalisasi politik, dan menantang ideologi ekstremis dapat membantu memerangi militansi dan mendorong perdamaian. Mendorong dialog antaragama, memajukan pendidikan,

dan menentang kesalahpahaman dapat mencegah militansi dan memperkuat perdamaian. Umat Islam menghadapi tantangan besar akibat militansi, namun mengatasi akar permasalahan, mendorong pendidikan, dan mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dapat menciptakan masa depan yang lebih damai. Mengatasi kesenjangan, ketidakstabilan politik, dan kerusuhan sosial juga penting untuk mencapai solusi jangka panjang.

Mencapai keseimbangan antara agama Islam, mencegah militansi, dan pertahanan negara memerlukan pendekatan multifaset. Hal ini mencakup kebebasan beragama, pendidikan, reformasi sosial-ekonomi, penafsiran Islam yang moderat, sistem pertahanan yang proaktif, dan dialog antaragama. Institusi keagamaan mendorong hidup berdampingan secara damai, tanggung jawab moral individu, dan dialog antaragama. Pemerintah memainkan peran penting dalam melawan militansi dan menjaga perdamaian dengan menerapkan strategi, kebijakan, dan perjanjian kerja sama yang efektif. Langkah-langkah proaktif dan tata kelola yang kuat sangat penting untuk melindungi warga negara dan menjaga keamanan negara dalam menghadapi tantangan-tantangan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abiodun, T. F. (2020). Usage of drones or unmanned aerial vehicles (UAVs) for effective aerial surveillance, mapping system and intelligence gathering in combating insecurity in Nigeria. *African Journal of Social Sciences and Humanities Research*, 3(2), 29–44.
- Aboul-Enein, Y. H., & Al-Zawahiri, A. (2004). The Ideologue of Modern Islamic Militancy. *Air University, Alabama, Counterproliferation Paper*, 21.
- Aly, H. (2014). Islamic law and the rules of war. *IRIN*, April.
- Barkey, K. (2014). Political legitimacy and Islam in the Ottoman Empire: lessons learned. *Philosophy & Social Criticism*, 40(4–5), 469–477.
- Birkler, J. L., Lorell, M. A., & Rich, M. D. (1997). *Formulating Strategies for International Collaboration in Developing and Producing Defense Systems*. Rand.
- Boukhars, A. (2017). *The geographic trajectory of conflict and militancy in Tunisia*. JSTOR.

- Brown, M., Chua, K. J., & Lukaszewski, A. W. (2021). Formidability and socioeconomic status uniquely predict militancy and political moral foundations. *Personality and Individual Differences*, 168, 110284.
- Cordesman, A. H. (2017). *Islam and the patterns in terrorism and violent extremism*. JSTOR.
- Corera, G. (2008). The world's most wanted cyber-jihadist. *BBC News*, 16(01).
- Counterterrorism, B. O. (2019). *Country Reports on Terrorism 2019*. US Department of State.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage publications.
- Darmawan, Harry. (2021). Longing for Kevin Rudd and His Legacy in Improving Australia-Indonesia Relations. *Journal of Social Political Science*, 2(2). <http://e-journal.unas.ac.id/index.php/jsps/article/view/58>
- Drissen, M. D. (2020). Evaluating Interreligious Dialogue in the Middle East. *Peace Review*, 32(1), 1–12.
- Ebrahimi, M., & Yusoff, K. (2017). Islamic Identity, Ethical Principles and Human Values. *European Journal of Multidisciplinary Studies*, 2(6).
- El-Hibri, T. (2010). *Parable and politics in early Islamic history: the Rashidun caliphs*. Columbia University Press.
- Ero, C., & Atwood, R. (2021, December 29). *10 Conflicts to Watch in 2022*. International Crisis Group. <https://www.crisisgroup.org/global/10-conflicts-watch-2022>
- Esposito, J. L. (2002). Jihad: Holy or Unholy War? *Alliance of Civilizations*.
- Gescinska, A. A. (2014, July 29). *The Peaceful Are Not Irrelevant*. Public Discourse. <https://www.thepublicdiscourse.com/2014/07/13561/>
- Grieco, K. A. (2018). The 2018 national defense strategy: continuity and competition. *Strategic Studies Quarterly*, 12(2), 3–8.
- Group, I. C. (2016). Exploiting Disorder: al-Qaeda and the Islamic State. *International Crisis Group*.
- Huang, L., & Zhu, Q. (2019). Adaptive strategic cyber defense for advanced persistent threats in critical infrastructure networks. *ACM SIGMETRICS Performance Evaluation Review*, 46(2), 52–56.
- Hunter, R., & Heinke, D. (2011). Radicalization of Islamic terrorists in the western world. *FBI L. Enforcement Bull.*, 80, 25.

- International Religious Freedom Report. (2022). *SAUDI ARABIA 2022 INTERNATIONAL RELIGIOUS FREEDOM REPORT*.
- Izant, C. L. (2010). *The Crusades and Jihad: Theological Justifications for Warfare in the Western and Islamic Just War Traditions*.
- Jones, S. G., Doxsee, C., Hwang, G., & Thompson, J. (2021). *The military, police, and the rise of terrorism in the United States*. JSTOR.
- Kenney, M. (2009). *Document Title: Organizational Learning and Islamic Militancy Organizational Learning and Islamic Militancy*.
- Khan, A. U. (2005). *The terrorist threat and the policy response in Pakistan*. Stockholm International Peace Research Institute Stockholm.
- Kuzub, A. (2022, July 28). *What should freedom of religion look like in public schools after Supreme Court decision?* Northeastern Global News. <https://news.northeastern.edu/2022/07/28/freedom-of-religion-public-schools/>
- LeSage, A. (2014). The rising terrorist threat in Tanzania: Domestic Islamist militancy and regional threats. *Strategic Forum*, 288, 1.
- Maizland, L. (2020). India's Muslims: An increasingly marginalized population. *Council on Foreign Relations*, 20.
- Mallarach, J.-M., & Verschuuren, B. (2019). Changing concepts and values in natural heritage conservation: A view through IUCN and UNESCO policies. *Values in Heritage Management: Emerging Approaches and Research Directions*.
- Mandaville, P., & Hamid, S. (2018). *Islam as statecraft: How governments use religion in foreign policy*. Brookings Institution Washington, DC.
- Mapping Militant Organizations. (2021, April). *The Islamic State*. Stanford University. <https://cisac.fsi.stanford.edu/mappingmilitants/profiles/islamic-state>
- Mische, P. M. (2007). The significance of religions for social justice and a culture of peace. *Journal of Religion, Conflict and Peace*, 1(1), 1–17.
- Moore, J. (2023). *The Evolution of Islamic Terrorism: An Overview*. PBS. <https://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/target/etc/modern.html>
- Muro, D. (2016). WHAT DOES RADICALISATION LOOK LIKE? Four visualisations of socialisation into violent extremism. *Notes Internacionals CIDOB*, 163, 1–5.
- National Intelligence. (2023). *ANNUAL THREAT ASSESSMENT OF THE U.S. INTELLIGENCE COMMUNITY*.

- Nawaz, S. (2016). *Countering Militancy and Terrorism in Pakistan*. JSTOR.
- Naz, S. (2020). Pakistan's Military Strategy: Challenges and Response. Available at SSRN 3576087.
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights Human Rights. (2008). *Terrorism and Counter-Terrorism*.
- Parkinson, S. E. (2021). Practical ideology in militant organizations. *World Politics*, 73(1), 52–81.
- Parrott, J. (2020). *Jihad in Islam: Just-war theory in the Quran and Sunnah*.
- Rahim, M., Ata-u-Rahman, A. A. K., & Muhammad, G. (2015). Religious Militancy in Islamic Perspective. *J. Appl. Environ. Biol. Sci*, 5(12), 157–166.
- Ramdeen, M. (2017). Countering terrorism and violent extremism in Africa. *Conflict Trends*, 2017(2), 49–56.
- Rofiqi, M. A., & Haq, M. Z. (2022). Islamic approaches in multicultural and interfaith dialogue. *Integritas Terbuka: Peace and Interfaith Studies*, 1(1), 47–58.
- Safei, A. A. (2021). Promoting moderate Islam in a global community through the 'English for Ulama' programme. *HTS Teologiese Studies/Theological Studies*, 77(4).
- Saunders, C. (2019, November 19). *Iran Military Power Report Statement*. U.S. Department of Defense. <https://www.defense.gov/News/Releases/Release/Article/2021009/iran-military-power-report-statement/>
- Schwadel, P., & Hardy, Sam. (2021, June 16). *Faith still shapes morals and values even after people are 'done' with religion*. The Conversation. <https://theconversation.com/faith-still-shapes-morals-and-values-even-after-people-are-done-with-religion-160328>
- Security, U. States. D. of H. (2019). *Department of Homeland Security Strategic Framework for countering terrorism and targeted violence*. Homeland Security.
- Sijamhodžić-Nadarević, D. (2023). Contribution of Islamic Religious Education to Intercultural Values in Pluralistic European Cultures: Insights from Bosnia and Herzegovina. *Religions*, 14(4). <https://doi.org/10.3390/rel14040453>
- Smock, D. R. (2006). *Religious contributions to peacemaking: When religion brings peace, not war*. US Institute of Peace.

- Stares, P. B., & Yacoubian, M. (2012). *Rethinking the War on Terror: new approaches to conflict prevention and management in the post-9/11 world*.
- Trip, S., Marian, M. I., Halmajan, A., Drugas, M. I., Bora, C. H., & Roseanu, G. (2019). Irrational beliefs and personality traits as psychological mechanisms underlying the adolescents' extremist mind-set. *Frontiers in Psychology, 10*, 1184.
- Trump, D. J. (2017). *National security strategy of the United States of America*.
- UNODC, U. (2009). *Frequently Asked Questions on International Law Aspects of Countering Terrorism*. Vienna.
- van Buitenlandse Zaken, M. (2015). *High-Level Thematic Debate of the United Nations General Assembly. Promoting Tolerance and Reconciliation/ UNSC Campaign*.
- Vermeulen, F., van Leyenhorst, M., Roex, I., Schulten, N., & Tuzani, N. (2022). Between psychopathology and ideology: challenges and practices in interpreting young extremists experiencing mental illness in the Netherlands. *Frontiers in Psychiatry, 12*, 790161.
- Vidino, L. (2010). *Countering Radicalization in America*. JSTOR.
- Vieten, C., & Lukoff, D. (2022). Spiritual and religious competencies in psychology. *American Psychologist, 77*(1), 26.
- Wasai, J. U., & Bano, A. (2019). Militancy and Pashtun Culture: Challenges and Developments in Pashtun Society in Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. *International Journal, 3*(2), 115–127.
- Wehrey, F., Farouk, Y., Brown, N. J., Al-Deen, M. S., Pierret, T., Alrefaai, L., Dunne, M., Boukhars, A., & Fakir, I. (2021). *Islamic institutions in Arab States: mapping the dynamics of control, co-option, and contention*.
- Yilmaz, I., & Erturk, O. F. (2021). Pro-Violence Sermons of a Secular State: Turkey's Diyanet on Islamist Militarism, Jihadism and Glorification of Martyrdom. *Religions, 12*(8), 659.